

**PERANAN TNI-AD PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA II
DI MAGELANG TAHUN 1948-1949**

JURNAL



Disusun Oleh :

Muhibas Sabri Selamat Pratama

10406244022

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2017

PERANAN TNI-AD PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA II DI MAGELANG TAHUN 1948-1949

Oleh
Muhibas Sabri Selamat Pratama

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan politik di Magelang menjelang Agresi Militer Belanda II; (2) proses berdirinya TNI-AD dan peranannya sebelum Agresi Militer Belanda II di Magelang; (3) peran dan strategi TNI dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II di Magelang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dirumuskan oleh Kuntowijoyo dengan *lima* tahapan penelitian yang harus dilalui. Tahap *pertama*, menentukan topik penelitian; tahap *kedua*, mengumpulkan sumber penulisan, baik sumber primer maupun sumber sekunder; tahap *ketiga* yaitu verifikasi atau kritik sumber; tahap *keempat*, menginterpretasikan sumber agar diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan kajian ini; dan tahap *kelima*, proses penulisan sejarah atau historiografi.

Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) kondisi geografis di Magelang merupakan pegunungan dan perbukitan, maka tidak mengherankan jika wilayah ini menjadi pos-pos komando perang gerilya, kondisi social-ekonomi dan politik menjelang Agresi Militer Belanda II di Magelang tidak stabil dikarenakan Belanda masih menduduki sebagian wilayah Indonesia termasuk Magelang(2) Berdirinya TNI sebagai alat negara bertugas menghadapi segala bentuk ancaman bagi Republik Indonesia seperti menghadapi pemberontakan PKI Madiun sebelum Agresi Militer Belanda II dan membentuk pemerintahan Militer di Jawa guna menghadapi Agresi Militer Belanda II. (3) peran TNI serta Masyarakat mampu menahan perlawanan Belanda dan Strategi *Wehrkreise* ternyata mampu menahan segala gempuran pasukan Belanda serta dapat mengacaukan pasukan Belanda seperti pembumihangusan, penyerangan, dan aksi-aksi sabotase. Pada agresi militer II Belanda tidak mampu mengalahkan dan melumpuhkan Republik seutuhnya, karena TNI serta masyarakat bersatu dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, serta saling bahu membahu demi tetap berdirinya Republik Indonesia.

Kata kunci: *Magelang, Agresi Militer Belanda II,*

THE ROLES OF TNI-AD DURING THE DUTCH MILITARY AGGRESSION II IN MAGELANG IN 1948-1949

Muhibas Sabri Selamat Pratama

(10406244022)

ABSTRACT

This study aimed to investigate: (1) geographical, social, economic, and political conditions in Magelang before the Dutch Military Aggression II; (2) the establishment of TNI-AD (the Indonesian National Armed Forces-the Army) and its roles before the Dutch Military Aggression II in Magelang; and (3) the roles and strategies of TNI in facing the Dutch Military Aggression II in Magelang.

The study used the historical research method formulated by Kuntowijoyo consisting of five research stages. The first was the research topic selection; the second was the collection of writing sources, both primary and secondary sources; the third was the verification or source criticism; the fourth was the source interpretation to obtain facts relevant to the study; and the fifth was the history writing process or historiography.

Based on the problems studied in this research, the conclusions were as follows. (1) Regarding the geographical conditions in Magelang, there were mountains and hills so that it was not surprising that this region became guerilla war command posts. The socio-economic and political conditions approaching the Dutch Military Aggression II in Magelang were unstable because the Dutch still occupied some parts of Indonesia including Magelang. (2) The establishment of TNI as a state instrument was intended to face all forms of threat to the Republic of Indonesia such as confronting PKI (Indonesian Communist Party) Madiun rebellion before the Dutch Military Aggression II and forming a military government in Java to face the Dutch Military Aggression II. (3) The roles of TNI and people were that they were able to resist the Dutch attack and the *Wehrkreise* Strategy was proved to be able to withstand all strikes of the Dutch troops and could disrupt them through scorched-earth policy, assault, and sabotage acts. In the second military aggression the Dutch were unable to defeat and paralyze the Republic completely, because TNI and people were united in an effort to struggle for the independence and worked together to keep the establishment of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Magelang, Dutch Military Aggression II*

I. Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak lahirnya bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa Indonesia secara resmi menjadi negara republik yang merdeka. Namun demikian, perjuangan bangsa Indonesia melawan rezim kolonial tidak berhenti begitu saja sebab Belanda masih ingin menjadikan Indonesia sebagai wilayah koloninya kembali. Pemerintah republik Indonesia kemudian melakukan upaya diplomasi luar negeri agar mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat dari dunia internasional.

Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan kemudian ditandai dengan perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Hal ini dilakukan agar kedua pihak melakukan gencatan senjata. Kenyataannya, pelaksanaan perundingan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Indonesia dan Belanda tetap berada dalam konflik untuk mempertahankan keinginannya masing-masing.

Pada 21 Juli 1947 untuk pertama kalinya Belanda melancarkan serangan polisionil terhadap Indonesia yang dikenal dengan Agresi Militer I.¹ Agresi ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra, Jawa, dan Madura. Aksi ini merupakan salah satu bentuk protes Belanda karena Perundingan Linggarjati dianggap tidak memihak kepada Belanda. Bagi Belanda, Indonesia belum sepenuhnya dianggap sebagai negara yang memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Agresi Militer I tersebut menyita perhatian dunia Internasional. Beberapa negara, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengusulkan agar Indonesia dan Belanda bertemu dalam sebuah perundingan. PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Amerika Serikat, Belgia, dan Australia untuk menyelesaikan ketegangan antara kedua negara. Upaya KTN membuahkan Perjanjian yang diselenggarakan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama Renville pada 17 Januari 1948.

Indonesia merasa bahwa hasil kesepakatan Perjanjian Renville lebih berpihak kepada Belanda. Keberadaan garis demarkasi dianggap oleh Indonesia sebagai upaya mempersempit posisi Indonesia. Belanda juga memaksa laskar-laskar perjuangan Indonesia dan tentara Indonesia agar mundur dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Belanda.

Dampak dari adanya garis demarkasi adalah pemindahan pasukan dari sejumlah daerah, seperti dari Jawa Barat dan sebagian Jawa ke pedalaman atau ke daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Laskar-laskar perjuangan dari Jawa Barat akhirnya harus pindah menuju daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah (Solo).² Belanda kemudian menyatakan tidak lagi terikat dengan persetujuan gencatan senjata sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian Renville. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak sampai ke pemerintah pusat

¹ Moekhardi, *Tentara Pelajar TGP 1945-1950*, Surabaya: Yayasan Eks Batalyon TGP 17, hlm.,72.

² A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 4 (periode Linggarjati)*. Bandung: Angkasa. 1978, hlm 440.

Republik Indonesia yang saat itu telah pindah dari Jakarta ke Yogyakarta sebab pendistribusian informasi dilarang oleh pihak Belanda.

19 sampai 22 Desember 1948 merupakan puncak Agresi Militer II yang dilakukan oleh Belanda. Pasukan Belanda ingin menyerang dan menguasai Ibukota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta dan bermaksud menawan presiden, wakil presiden, dan tokoh-tokoh pemerintah Republik Indonesia lainnya. Sementara itu, pasukan Belanda yang sudah berada di wilayah Gombong sejak Agresi Militer I bergerak ke arah Purworejo menuju Magelang dengan maksud untuk menduduki wilayah Yogyakarta.³

Pasukan Belanda ternyata telah berhasil menyerang Yogyakarta dari arah Maguwoharjo.⁴ Mengetahui kondisi ini maka pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di Magelang mulai melancarkan strategi agar Magelang tidak dikuasai oleh Belanda. Perlawanan antara pasukan TNI yang berada di Magelang dengan Belanda akhirnya tetap tidak dapat terhindarkan. TNI bersama warga sipil akhirnya melakukan siasat perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Langkah ini dilakukan karena kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa pasukan Belanda memiliki persenjataan yang lebih kuat dibanding Indonesia.

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan sejarah perlu juga diketahui konsep-konsep untuk memahami permasalahan yang akan dikaji, salah satunya melalui sumber-sumber pustaka atau yang sering disebut kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran.⁵

Dalam buku berjudul *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya* (1977) yang disusun oleh Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro membahas mengenai peristiwa-peristiwa pertempuran selama Agresi Militer Belanda 1947-1949 dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Serta strategi pertempuran pada Agresi Militer Belanda I yang menginspirasi penulis untuk memberikan informasi mengenai strategi pertempuran yang terjadi pada Agresi Militer Belanda II khususnya di Kota Magelang.

Selanjutnya, buku yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Edisi Agresi Militer Belanda I, Jilid 5* (1978), karangan A.H. Nasution. Di dalam buku ini dibahas peristiwa-peristiwa seputar Agresi Militer I. Selain itu, disampaikan juga mengenai kedatangan kembali Belanda ke Indonesia bersama dengan tentara Sekutu. Kemudian, buku lainnya merupakan kelanjutan dari buku

³ Madjiono, 2003, *Sejarah Perjuangan Masyarakat Kota Magelang di Masa Perjuangan Fisik Tahun 1945-1950*. Magelang: Dewan Harian Cabang Angkatan 45.hlm, 36.

⁴ Moedjanto. MA, *Indonesia Abad 20 (Jilid 2), dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius. 1998, hlm.,42.

⁵ Jurusan Pendidikan Sejarah. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Falkutas Ilmu Sosial dan Ekonomi. 2006.Hlm.3

yang ditulis oleh A.H. Nasution tersebut, yaitu *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia; edisi Agresi Militer Belanda II Jilid 2-10*, (1979). Pada buku ini, dibahas mengenai serangan Belanda terhadap Indonesia dan peranan TNI dan rakyat Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer I dan II.

Buku berikutnya berjudul *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di masa Jang Lalu dan Jang Akan Datang* yang ditulis oleh A.H. Nasution. Buku ini membahas tentang strategi militer yang digunakan dalam perang gerilya.

B. Historiografi yang Relevan

Historiografi adalah usaha merekonstruksikan sejarah dengan mengarahkan seluruh daya pikiran, ketrampilan teknik, penggunaan kutipan dan catatan, serta yang paling utama adalah penggunaan pikiran kritis dan analitis yang akhirnya menghasilkan suatu sintesa dari seluruh hasil penelitian secara utuh.⁶ Historiografi yang relevan ini merupakan proses perbandingan dan pengumpulan hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, dan skripsi yang datanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa historiografi yang relevan, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Wulandari, mahasiswa Jurusan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *Peranan Masyarakat Sendangmulyo Pada Masa Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta*. Skripsi ini membahas mengenai usaha-usaha Masyarakat Sendangmulyo Yogyakarta dalam membantu para pasukan TNI ketika pasukan Belanda memasuki wilayah Yogyakarta pada tahun 1948-1949. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi milik penulis terletak pada ruang lingkup spasial kajiannya dan menitik beratkan pada peran masyarakat Sendangmulyo. Perbedaan lainnya adalah skripsi milik penulis tidak mengemukakan peran TNI dalam Agresi Militer II pada tahun 1948-1949.

Selanjutnya, buku berjudul *Magelang Kembali*⁷ sebuah buku berisi tulisan-tulisan yang menceritakan sejarah, sosial budaya, dan rangkaian peristiwa yang terjadi di Magelang masa pasca Proklamasi dalam mempertahankan Kemerdekaan yang dibalut dalam sebuah cerita fiksi. Dalam buku ini tidak disertakan dengan sumber-sumber secara ilmiah dan menitik beratkan kepada peran masyarakat dan dampak social denan balutan crita fiksi yang berlatar masa Agresi Militer Belanda II di Kota Magelang.

C. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap. Kelima tahap tersebut yaitu pemilihan

⁶ *Ibid.* hlm.18

⁷ M.K. Prayitno, *Magelang Kembali*, Jakarta:Balai Pustaka, 2007.

topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan historiografi (penulisan sejarah)⁸.

Pemilihan topik merupakan langkah awal ketika akan melakukan suatu penelitian sejarah. Heuristik (Pengumpulan Data) Tahap ini merupakan kegiatan menghimpun atau mengumpulkan sumber penulisan.

Menurut Louis Gottschalk sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder.⁹ Dalam penelitian ini, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang menyaksikan sendiri peristiwa yang dikaji dalam penelitian ini atau sumber yang diperoleh dari alat mekanis lain seperti diktafon, yaitu alat atau orang yang hadir pada peristiwa sejarah

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah wawancara dengan Abak B. Sabar yang lahir pada tanggal 21 Maret 1928, seorang Veteran Purn.Brimob Kompi Reserve II/5138 Gombel, yang banyak memberi informasi situasi dan kondisi pada saat agresi militer Belanda II di Magelang.

Sumber sekunder adalah cerita atau penuturan dan catatan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan sendiri oleh informan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Louis Gottschalk¹⁰.

Kritik Sumber Pada tahap ini dilakukan uji kredibilitas dan autentisitas sumber-sumber yang sudah dikumpulkan. Proses ini untuk mengetahui keaslian konten “rekam jejak” sejarah (sumber). Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu *kritik ekstern* dan *kritik intern*. *kritik ekstern* berkaitan dengan pengujian autentisitas yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesahihan suatu sumber sejarah.¹¹

Interpretasi adalah proses menafsirkan sumber sejarah yang telah diperoleh setelah melalui proses kritik sumber. Dari proses interpretasi atau penafsiran ini maka akan diperoleh fakta-fakta sejarah dan hanya fakta-fakta yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang akan disampaikan dalam tulisan. Dalam penelitian ini, tahapan interpretasi atau penafsiran sumber dilakukan baik terhadap sumber tertulis maupun sumber lisan sehingga tercipta suatu hubungan yang masuk akal.¹²

Historiografi adalah tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini sintesa yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk karya sejarah.¹³

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng. 1995), hlm. 90.

⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, A.b. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1975, hlm.,43.

¹⁰ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto)* 1986. Jakarta: UI-Press, hlm. 35

¹¹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. 1995. Yogyakarta: Benteng Pustaka, hlm., 101.

¹² I Gede Wija. *Sejarah Lokal Suatu Prespektif dalam Pengajaran Sejarah*, Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989, hlm.,18.

¹³ Nugroho Notosusanto. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu*

2. Pendekatan Penelitian

Guna mengungkapkan peristiwa dalam penulisan sejarah, perlu dilakukan pendekatan multidimensional agar permasalahan yang diteliti dapat diungkapkan secara lengkap. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisannya, yaitu pendekatan politik, militer, sosiologi. Pendekatan politik lebih menekankan tentang struktur kekuasaan, pertentangan kekuasaan, dan pertempuran.¹⁴

II. PEMBAHASAN

Kondisi Geografis, Sosial-Ekonomi, dan Politik Wilayah Magelang

A. Kondisi Geografis dan Sejarah Wilayah

Magelang Wilayah Magelang berada di tengah Pulau Jawa.¹⁵ Wilayah ini berjarak sekitar 80 km dari Semarang selaku ibukota Propinsi Jawa Tengah dan sekitar 60 km dari Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena letaknya yang berada di antara Semarang dan Yogyakarta, maka pada masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Magelang sudah memegang peran cukup penting dalam menghubungkan wilayah pesisir utara dan pesisir selatan Pulau Jawa. Keberadaan jalan raya (*Groote Weg*) dan jalur kereta api Yogyakarta–Willem I yang dibangun pada masa itu semakin memperkuat peran tersebut.¹⁶

Bentang alam wilayah Magelang merupakan pegunungan dan perbukitan.¹⁷ Letaknya berada di ketinggian antara 154 sampai 3296 meter di atas permukaan laut. Ada beberapa gunung yang mengelilingi wilayah ini, yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Dengan relief dataran wilayah Magelang yang berbukit maka tidak mengherankan jika wilayah ini menjadi medan pertempuran perang gerilya, terutama pada saat Agresi Militer Belanda II.

B. Kondisi Sosial-Ekonomi Wilayah Magelang

Pengalaman). 1978 Jakarta: Yayasan Indayu, hlm. 36

¹⁴Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm., 92.

¹⁵ A.M. Djulianti Suroyo, *Eksplorasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000, hlm., 41.

¹⁶ Kusmahendra Dwi Saputro, *Trem dalam Kota: Pendaayagunaan Trem Trayek Yogyakarta-Willem I di Kota Magelang, Tahun 1898-1930an*. Tesis Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan. 2016.

¹⁷ "Magelang" dalam *Ensiklopedi Indonesia*. Jilid 4. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983) hlm., 2082.

Komposisi penduduk Magelang pada periode 1948 sampai 1949 tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk Magelang pada masa kolonial, yaitu terdiri dari penduduk pribumi, Orang Eropa, dan Etnis Tionghoa serta kalangan Timur Jauh. Kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, jumlah orang Eropa di Magelang mengalami penurunan. Namun demikian, beberapa diantaranya masih ada yang memilih untuk tetap tinggal di Magelang pasca Agresi Militer Belanda II.

Sebagian besar penduduk Magelang menetap di wilayah pedesaan, sementara pusat kota merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas Orang Eropa, Etnis Tionghoa dan kalangan Timur Jauh, sementara kalangan pribumi yang menetap di perkotaan adalah mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Sebagian besar penduduk Magelang berprofesi sebagai petani dan tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari sistem perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian dan juga kondisi geografis wilayah Magelang yang mendukung keberadaan sektor ini.

C. Kondisi Politik Wlayah Magelang

Situasi keamanan pasca proklamasi menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia berusaha mengambil alih semua aktifitas pemerintahan dan militer yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing. Oleh sebab itu, pada 22 September 1945 pemerintah pusat mengintruksikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di Magelang juga dibentuk BKR, yang mayoritas anggotanya merupakan mantan pasukan *KNIL*, *Peta* dan *Heiho*, seperti Mohammad Sarbini, Ahmad Yani, Maryadi, Kun Khamdani, Slamet Soedibyo, Soerjo Soempeno, Soeratman dan lain-lain.¹⁸

III. Berdirinya TN dan Peranannya Sebelum Agresi Militer Belanda II

A. Pasca Proklamasi dan Munculnya Gerakan Kelaskaran

Munculnya berbagai organisasi kelaskaran yang mempunyai tujuan utama yaitu mempertahankan dan berjuang atas nama Kemerdekaan Republik, namun hal ini turut diikuti juga dengan munculnya laskar–laskar yang beraliran kiri terutama berasal dari PESINDO yang diberi tugas untuk membimbing ideology tentara, namun pada umumnya banyak pula terdiri dari pemuda yang beraliran kiri dan telah berakar hingga desa–desa. Kader–kader sayap kiri ini dilatih oleh pelatih yang berpengalaman, seperti Abdul Rakhman yang pernah mengembang ilmu militer yang cukup di Negeri Belanda.¹⁹

Semakin berkembangnya laskar di Republik Indonesia dapat dilihat dari konferensi yang diadakan pada tanggal 12 April 1947 di bawah pimpinan koordinator se Jawa tengah Jendral. Sakirman yang berjalan seiring dengan organisasi pergerakan nasional menuju kemerdekaan bangsa Indonesia.

¹⁸ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op.cit*, hlm.55.

¹⁹ A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 4 (periode Linggarjati)*. Bandung: Angkasa. 1978, hlm 440.

B. Lahirya Tentara Nasional Indonesia dan Pertempuran sebelum Agresi Militer Belanda II

Menteri Pertahanan menjelaskan di depan radio pada tanggal 8 Mei 1947, bahwa keputusan itu dijalankan/didasarkan atas pandangan revolusi perjuangan 45. Untuk itu perlu diciptakan suatu tentara yang teratur, yang merupakan satu-satunya alat Negara yang mempertahankan kedaulatan Negara ke luar. Beberapa perundingan dilakukan di Jakarta dan pada 3 Juni 1947 keluar Dekrit Presiden Sukarno yang melahirkan TNI²⁰

Sejak dibentuknya Tentara Nasional Indonesia telah dihadapkan oleh keadaan pelik. Kedatangan pasukan NICA di Jawa Tengah dan usaha untuk merebut kantong-kantong gerilya di daerah garis status quo. Di daerah perbatasan antara daerah Ambarawa dengan Pingit ada upaya membangun pertahanan untuk menjaga kemungkinan pasukan Belanda melakukan penyerangan yang kedua kali. Rencana itu, ternyata sudah ada yang memikirkan jauh sebelum terdengar berita pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Daerah yang paling cocok untuk pertahanan militer Magelang adalah desa Pingit kecamatan Pringsurat karena daerah ini letaknya jauh dari kota praja Magelang. Selain itu alam sekitarnya sangat mendukung untuk penghadangan pasukan Belanda, jika melakukan penyerangan ke Yogyakarta. Keadaan seperti itu sudah dipersiapkan oleh Mayor A. Yani.²¹

C. Tentara Nasional Indonesia dalam Pembersihan Gerakan Ekstrimis Kiri di Magelang

Pada tanggal 1 Oktober 1948 keluar Peraturan pemerintah tentang pemberantasan kaum pemberontak, yang dimaksudkan untuk memudahkan usaha pemerintah dalam mempertahankan dan menyelamatkan Negara. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa barang siapa dalam keadaan bahaya dengan perkataan, tulisan atau perbuatan menyatakan setuju dengan perbuatan pemberontak, yang dengan kekerasan telah berusaha merebut kekuasaan pemerintah, dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.²²

Dampak dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun terasa hingga Magelang. Terdapat simpatisan-simpatisan yang turut berjuang melawan pemerintah Republik Indonesia, di Magelang colonel Bambang Sugeng bertindak

²⁰ *Ibid*, hlm.444.

²¹ Mayor A. Yani Komandan Batalyon II Resimen 19 dari Divisi III Diponegoro telah merencanakan untuk membuat pertahanan militer guna menghadapi serbuan pasukan Belanda yang sewaktu-waktu datang dari Semarang. Dalam pertahanan tersebut dibagi menjadi 3 garis lapisan yang terdiri dari: Garis pertama di Desa Pingit, garis kedua di desa Pingit, garis ketiga di Desa Pongonan. Tim Riset Pemda Kab.Magelang. *Naskah Perjuangan Rakyat Kabupaten Magelang*. Magelang:BAPEDA. 1974, hlm.142.

²² DR. A. H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8*. Bandung: Angkasa. 1978, hlm. 291.

untuk membubarkan semua organisasi yang berafiliasi terhadap PKI dan menangkap pemimpin – pemimpinnya. Pemberontakan semakin meluas PKI berhasil merebut kekuasaan sekitar desa Sawangan dan Tegalrejo, kaum pemberontak yang berada di Mertoyudan dengan mendapat bantuan dari masyarakat yang telah mereka hasut menyerang aparat Negara di desa Sorong dan Pakelan. Sejumlah daerah di Selatan Magelang dapat dikuasai oleh pihak PKI. Pada keesokan harinya 27 September 1948 pihak polisi bersama tentara melancarkan serangan balasan, dengan dua pemimpin pemberontak dapat ditangkap yaitu Letnan Surip dan Letnan Said keduanya erupakan Resimen 3 setempat.²³

D. Persiapan Menghadapi Agresi Militer Belanda Kedua.

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda sebagai akibat adanya perjanjian Renville dan penumpasan PKI Madiun memberikan kesempatan kepada Belanda untuk lebih menekan Republik Indonesia. Perundingan–perundingan yang dilakukan dibawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu. Bagi bangsa Indonesia telah yakin bahwa Agresi Militer Belanda II akan terjadi. Karena itu akan dipercepat pembuatan instruksi Panglima Besar tanggal 9 November 1948 dan konferensi dengan semua komandan daerah, gubernur dan residen pada tanggal 11 November 1948. Dalam konferensi ini dijelaskan tindakan – tindakan yang harus diambil. Atas dasar ini maka tiap – tiap daerah masih sempat mengadakan tindakan–tindakan persiapan yang sama sehingga kita tinggal menunggu saja saatnya. Dengan Komandan Militer kota Jogjakarta telah diatur pula tempat pengungsian komando pertama dalam kota dan kemudian ke luar kota. Begitu juga telah dipersiapkan tempat – tempat pengungsian untuk Panglima Besar dan Soekarno-Hatta.

Sementara itu Jendral Sudirman terpisah dari staf dan mengatur pengungsian sendiri yang disiapkan oleh colonel Santoso, yakni menyingkir ke Jawa Timur. Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng telah mengadakan rapat pada tanggal 11 November 1948 di Magelang, yang merencanakan persiapan – persiapan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda, yang dihadiri oleh semua Komandan Brigade dan perwira staf.²⁴

Arah pertahanan Divisi II dan III di Jawa Tengah mengikuti jalan raya yang menuju Semarang – Purwokerto. Sejak hari – hari terakhir telah dimulai mengadakan rintangan – rintangan dan perusakan – perusakan jalan sepanjang kurang lebih 10 km dengan samara latihan umum.

IV. Peran dan Strategi TNI Menghadapi Agresi Militer Belanda II Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949

A. Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949

²³ *Ibid*, hlm.277.

²⁴ Pridjadjji. *Perjuangan Komando Distrik Militer dalam Menghadapi Class II*. Skripsi.IKIP Press:tidak diterbitkan. 1997, hlm.45.

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda sebagai akibat adanya perjanjian Renville dan penumpasan PKI memberikan kesempatan kepada Belanda untuk lebih menekan RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan dibawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu, sebab memang Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin diterima RI. Pada tanggal 11 Desember 1948, para penguasa Belanda memberi tahu komisi jasa baik (KTN) bahwa benar-benar tidak mungkin mencapai persetujuan dengan para pemimpin Republik dan bahwa perundingan dengan bantuan komisi-komisi itu akan sia-sia pada tahap ini. Mereka mengatakan akan terus maju dan membentuk suatu pemerintahan federal sementara tanpa Republik, meskipun republik akan diberi suatu tempat jika kelak masuk.²⁵

Agresi Militer Belanda II pun dimulai, persiapan – persiapan sudah militer telah sampai di Jawa Tengah, Banyumas dan Semarang menjadi pusat – pusat tentara Belanda. Di Banyumas Divisi B dibawah pimpinan Jendral Mayor Meier disiapkan untuk menyerbu daerah Kedu, berkekuatan kurang lebih 20 batalyon. Pasukan TNI yang akan menghadapinya adalah Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Divisi III dibawah pimpinan Kolonel Bambang Sugeng. Brigade X dibawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto harus mempertahankan Yogyakarta dengan 2 Batalyon infanteri, tanpa senjata bantuan, dibantu oleh berbagai pasukan kecil seperti kompi yang terdiri dari kadet – kadet Akademi Militer, beberapa detasemen dari Brigade 16 terdiri dari pasukan Mayor Kahar Muzakkar, Mayor Pelaupessy dan pasukan lainnya. Brigade IX dibawah pimpinan Mayor Ahmad Yani harus mempertahankan daerah Magelang, Temanggung kekuatan brigade ini 4 batalyon infanteri.²⁶ Dengan demikian hampir lebih dari 505 seluruh komandi tertumpuk di Jawa Tengah khususnya daerah Kedu dan Yogyakarta. Hal ini menjadikan Kedu dan Yogyakarta menjadi sasaran empuk bagi suatu operasi penghancuran secara mendadak, karena pasukan – pasukan ini telah terkepung dari tiga arah yaitu Barat, Selatan dan Utara dan diperparah posisi Ibu Kota berada di tengah–tengah.

Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno dan wakil presiden M. Hatta bersama sejumlah menteri yang kemudian diasingkan ke pulau Bangka. Tetapi sebelumnya, Presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Syarifudin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk membentuk dan memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain di Sumatra kepala Mr. A.A Maramis, LN Dalar dan dr. Soedarsono juga diberi mandat untuk melakukan hal sama bila PDRI di Sumatra tidak berhasil dibentuk.²⁷ Pada tanggal 19 Desember 1948,

²⁵ G.M.T. Kahin. *Nasionalisme dan revolusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1995, hlm.425.

²⁶ *Ibid*, hlm.198.

²⁷ A.B. Lopian. *Terminologi Sejarah 1945-1950 dan 1950-1959*. Jakarta: Depdikbud. 1996, hlm.5.

pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta yang terkenal dengan nama Agresi Militer Belanda Kedua.

Pasukan Belanda akhirnya berhasil memasuki kota Magelang pada malam hari, tepatnya 21 Desember 1948. Saat mereka tiba, kota ini sudah dalam kondisi hancur. Sebenarnya, beberapa hari sebelum Agresi Militer II mencapai puncaknya, tidak sedikit bangunan di Kota Magelang dan di wilayah sekitarnya sudah mengalami kehancuran.²⁸

B. Peranan TNI dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda II di Magelang tahun 1948/1949

Dengan menduduki Jogjakarta, yang sebagai pusat pemerintahan RI, Belanda mengira bahwa riwayat RI akan segera berakhir. Akan tetapi pemimpin-pemimpin telah memperhitungkan segala kemungkinan. Pemerintah darurat segera menjalankan tugasnya. Mr. Syarifudin Prawiranegara yang ada di Sumatra bertindak sebagai Kepala Pemerintah Darurat. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyingkir dari Jogjakarta dan masuk ke daerah pedalaman. Di sana diatur pertahanan dan dipikirkan siasat penyerbuan. Di desa-desa, di lereng-lereng gunung TNI menyiapkan diri untuk melakukan perangnya.²⁹

Seluruh kekuatan yang masih ada di kota Jogjakarta diperintahkan keluar dari kota untuk bergerilya dan dipimpin oleh panglima Besar Jenderal Soedirman. Angkatan Perang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatra. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa dijabat oleh kolonel A.H. Nasution dan pada tanggal 22 Desember 1948 telah mengumumkan berdirinya pemerintahan Militer untuk Jawa.

Dengan modal pengalamannya, kolonel A.H. Nasution telah menyiapkan konsepsi baru di bidang pertahanan, yang kemudian dituangkan dalam Perintah Siasat No. 1 tahun 1948.³⁰

1. Peran Masyarakat Magelang dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda II

Sesampainya di Magelang, pasukan Belanda tidak menemukan aktivitas sipil ataupun militer dalam bentuk apapun. Sepanjang jalan menuju Kotapraja Magelang tidak ada gedung-gedung yang utuh, di mana hampir sebagian ada yang telah terbakar menjadi arang.³¹ Bersamaan itu, pasukan Belanda dari kesatuan

²⁸ "Magelang: Scholen" dalam *Nieuwe courant*, 14 September 1949, diunduh dari situs <http://www.delpher.nl/nl/kranten> pada 9 Juli 2017.

²⁹ CST. Kansil, dan Juliantp, M.A. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm.53.

³⁰ Madjiono. *Sejarah Perjuangan Masyarakat Kota Magelang di Masa Perjuangan Fisik Tahun 1945-1950*. Magelang: Dewan Harian Cabang Angkatan 45. 2003, hlm.80.

³¹ Madjiono. *Sejarah Perjuangan Masyarakat Kota Magelang di Masa Perjuangan Fisik Tahun 1945-1950*. Magelang: Dewan Harian Cabang Angkatan 45. 2003.hlm.82.

Zeni berusaha membangun kembali gedung-gedung tersebut, meski tidak sempurna dan kemungkinan menurut mereka bisa digunakan sebagai markas dan pertahanan selama mereka berada di Kotapraja Magelang. Sedangkan, pasukan dari Batalyon "Anjing NICA" dari Brigade W dibawah pimpinan Letnan Kolonel van Sassen terus menerus aktif melakukan pembersihan-pembersihan di Kotapraja Magelang.³²

C. Strategi TNI dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda II di Magelang

Agresi Militer Belanda I dimana TNI masih memberakutkan sistem pertahanan linier, pertahanan TNI di beberapa daerah berhasil diterobos oleh Belanda, namun pasukan TNI tidak bergerak mundur, melainkan membentuk kantong-kantong perlawanan. Ketika Belanda menyatakan batas daerah pendudukannya dan daerah Republik dengan garis demarkasi Van Mook, pasukan TNI yang menduduki kantong-kantong perlawanan di daerah yang diakui Belanda sebagai daerah pendudukannya harus menarik diri.

Pasukan TNI melancarkan aksi pembumihangusan pusat kota Magelang. Hanya ada beberapa bangunan yang tersisa. Pembumihangusan bertujuan untuk mengacaukan kedatangan Belanda dan memperlambat gerakan mereka. Sebagian besar penduduk pribumi yang menetap di pusat kota sudah mengungsi bersama sebagian pasukan TNI ke daerah-daerah di lereng gunung Sumbing, Merbabu, dan Merapi. Hanya sebagian penduduk pribumi yang berstatus sebagai pegawai negeri saja yang memilih untuk tidak meninggalkan rumah mereka dan kalangan Etnis Tionghoa yang cenderung memihak kepada Belanda.

1. Pembentukan *Wehrkreise* di wilayah Magelang

Dalam waktu satu bulan, divisi III di Jawa Tengah telah membentuk tiga daerah lingkaran pertahanan, yaitu *Wehrkreise* I, II dan III. *Wehrkreise* I yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Muhammad Bakhrun meliputi daerah Banyumas, Pekalongan, dan Wonosobo dengan pos komando berada di Desa Makam di sebelah utara Purbalingga. *Wehrkreise* II dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini dengan cakupan daerah yaitu Kedu kecuali (Wonosobo) dan Kabupaten Kendal (Semarang Barat), dengan pos komando berada di Bruno sebelah utara Purworejo. Sementara itu, *Wehrkreise* III dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto dan meliputi daerah Yogyakarta dengan pos komando berada di daerah pegunungan Menoreh.

Magelang dalam Cakupan *Wehrkreise* II, *Wehrkreise* II di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini terbagi atas tiga sub-*wehrkreise* di utara yang dipimpin Mayor Ahmad Yani, Komandan Brigade 9 dengan tiga batalyon kekuatan, antara lain Temanggung-Kendal dipimpin Mayor Panuju, Magelang dipimpin Mayor Suryosumpeno, dan Muntilan dipimpin Mayor Daryatmo. Sementara itu, dua batalyon dari brigade 10 ada di wilayah Bagelen, masing-masing dipimpin oleh Mayor Sudarmo untuk wilayah Kebumen dan Mayor Sruhardoyo untuk wilayah Purworejo. Dengan demikian, secara keseluruhan kekuatan TNI di wilayah *Wehrkreise* II mencapai lima batalyon dengan kekuatan persenjataan mencapai sekitar 80% ditambah dengan pasukan lain.³³

³² Moehkardi. *Magelang Berjuang*. Magelang: Angkatan Darat. 1983, hlm.77.

Dalam mengangani urusan sipil dalam pemerintahan militer di tingkat kabupaten (sub-*wehrkreise*) maka setiap komandan sub-*wehrkreise* didampingi oleh bupati. Para bupati biasanya didampingi oleh polisi dan beberapa orang kepala jawatan di tingkat kabupaten.

2. Aksi Sabotase Rel Kereta Api

TNI dibantu oleh warga sipil menyabotase jalur kereta api dari Yogyakarta menuju Magelang hingga ke Ambarawa. Bagi Belanda, kereta api merupakan alat pengangkutan penting untuk mengangkut pasukan dan logistik yang dibutuhkan di medan pertempuran. Sepanjang bulan April 1949, TNI bersama warga sipil mulai melakukan aksi sabotase jalur kereta api yang ada di Magelang. Aksi sabotase yang dilakukan oleh TNI bersama warga sipil tidak hanya menimbulkan kerugian dan korban luka-luka di pihak Belanda, tetapi juga tidak jarang memakan korban dari kalangan warga sipil. Seperti peristiwa sabotase rel yang terjadi pada 6 Juni 1949.³⁴ Saat itu sebuah kereta api dari Secang menuju Magelang sedang melintas dan keluar dari jalur. Peristiwa ini menyebabkan satu orang tentara Belanda dan tiga warga sipil meninggal. Sebelumnya, pada 10 Mei 1949, TNI menyabotase kereta api dari arah utara Magelang yang mengangkut pasukan Belanda untuk detasemen Blondo. Akibat sabotase ini, lokomotif dan tiga gerbong kereta api tersebut mengalami kerusakan.

3. Aksi Penghadangan Truk Pasukan Belanda

TNI dan warga sipil senantiasa berupaya melakukan berbagai cara untuk melemahkan kekuatan pasukan Belanda, salah satunya adalah dengan menghadang truk baik yang mengangkut pasukan maupun logistik pertempuran. Aksi penghadangan ini terutama terjadi di sejumlah daerah yang berada di luar kota Magelang. Dalam aksi penghadangan ini, sejumlah korban berjatuh dari pihak musuh dan TNI berhasil menyita senjata milik mereka. Iring-iringan kendaraan musuh kembali dihadang oleh TNI ketika melintasi daerah Blabak pada 27 Februari 1949. Satu truk berhasil dihancurkan oleh TNI, namun aksi ini terhenti akibat kedatangan bantuan pasukan Belanda dari arah Kota Magelang.

D. Akhir Pendudukan Belanda dan Akhir Agresi Militer Belanda II

Belanda berhasil menduduki Magelang selama kurang lebih satu tahun (Desember 1948 sampai dengan Desember 1949). Selama itu Belanda berhasil mengaspal jalan-jalan protokol yang sudah rusak sejak pendudukan Jepang, memperbaiki jembatan sungai Progo yang telah dihancurkan oleh pasukan TNI dan penduduk, dan merehabilitasi beberapa gedung yang mereka tempati, serta membuka kembali beberapa sekolah.³⁵

³³ A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10. Agresi Militer Belanda II*. Bandung: Angkasa. 1979, hlm.37.

³⁴ “Trein ontspoord” dalam *De vrije pers*, 10 Juni 1949, diunduh dari situs <http://www.delpher.nl/nl/kranten> pada 9 Juli 2017.

³⁵ T.B. Simatupang. *Laporan dari banaran, Kisah Pengalaman Seorang Prajurit selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Sinar Harapan. 1980, hlm.83

Suatu peristiwa penting yang amat bersejarah bagi rakyat Magelang, adalah peristiwa penyerahannya pemerintahan dari tangan pemerintah Belanda kepada Letnan Kolonel A. Yani yang disaksikan oleh Letnan Kolonel Sarbini. Pada tanggal 30 November 1949, Salaman diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Disusul pada tanggal 12 Desember 1949 merupakan hari kembalinya Magelang ke Republik Indonesia dan disertai bertemunya para pemimpin militer terbaik dan rakyat sipil.³⁶ Hal ini tindakan awal menuju pengosongan seluruh Kabupaten Magelang, Temanggung dari tentara Belanda, disusul pengosongan tentara Belanda di Kota Magelang yang akhirnya meninggalkan Magelang menuju Semarang dan seterusnya untuk angkat kaki dari Indonesia.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Magelang adalah sebuah wilayah yang terletak di Propinsi Jawa Tengah,. Dengan relief dataran wilayah Magelang yang berbukit maka tidak mengherankan jika wilayah ini menjadi medan pertempuran perang gerilya, terutama pada saat Agresi Militer Belanda II. Kondisi social-ekonomi dan politik menjelang Agresi Militer Belanda II di Magelang tidak stabil dikarenakan Belanda masih menduduki sebagian wilayah Indonesia termasuk Magelang

Kedua, Munculnya berbagai organisasi kelaskaran yang mempunyai tujuan utama yaitu mempertahankan dan berjuang atas nama Kemerdekaan Republik, namun hal ini turut diikuti juga dengan munculnya laskar-laskar yang beraliran kiri. Pertikaian politik semakin menjalar kedalam kelaskaran dan telah menjadi kekuatan bersenjata dan aliran politik. Maka tanggal 5 Mei 1947 keluarlah keputusan Presiden.

Menteri Pertahanan menjelaskan di depan radio pada tanggal 8 Mei 1947, bahwa keputusan itu dijalankan/didasarkan atas pandangan revolusi perjuangan 45. Untuk itu perlu diciptakan suatu tentara yang teratur, yang merupakan satu-satunya alat Negara yang mempertahankan kedaulatan Negara ke luar. Beberapa perundingan dilakukan di Jakarta dan pada 3 Juni 1947 keluar Dekrit Presiden Sukarno yang melahirkan TNI. TNI Angkatan Darat dihadapkan dengan serangkaian peristiwa yang menjadi tonggak awal kiprahnya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia dengan melawan Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan Agresi Militer Belanda II pada ahun 1948-1949.

Keempat, ketika menghadapi Agresi Militer Belanda I TNI memiliki pengalaman pahit karena menggunakan system pertahanan linier, pengalaman adalah guru yang sangat berharga dalam proses perjalanan hidup. Untuk itu supaya tidak terulang kembali pengalaman lama, maka diupayakan strategi dan taktik perang baru. Taktik menghadapi serangan Belanda diperlukan system

³⁶ Arip di Kabupaten Magelang serta Kota Magelang tentang Sekitar Perjuangan Rakyat Magelang Periode Revolusi. Naskah Ketikan), Hadiono, Wawancara 21 Maret 2010 dalam Kusmahendra D.S. *Peranan Tentara Pelajar dalam Mempertahankan Kemerdekaan Di Kota Magelang 1948-1949*. Skripsi. UNY Press.tidak diterbitkan.2010, hlm 95.

pertahanan tertutup perwilayah operasi perlawanan atau *Wehrkrise*. Bentuk strategi ini merupakan pengganti strategi pertahanan linier yang diterapkan oleh TNI saat menghadapi Belanda dalam Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli 1947.

Pada saat puncak agresi Militer II pada 19 sampai 22 Desember 1948, Magelang merupakan satu-satunya wilayah yang harus diduduki Belanda. Pasukan TNI juga tidak jarang melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang mengadakan patroli, baik di pusat kota maupun di desa-desa di wilayah Magelang.

Sabotase-sabotase dan penyerangan terhadap pasukan Belanda ini tidak hanya menimbulkan kerugian di pihak pasukan Belanda, tetapi juga di pihak Indonesia. Tidak jarang, upaya ini menimbulkan korban jiwa baik di pihak Belanda maupun di pihak TNI dan warga sipil. Namun demikian, Hal tersebut tidak menyurutkan langkah TNI bersama warga sipil yang ada di wilayah Magelang untuk tetap berjuang menegakkan eksistensi Indonesia sebagai negara baru yang merdeka dan berdaulat. TNI bersama warga sipil berperan penting sebagai pihak yang senantiasa berupaya mengusir pendudukan Belanda sampai akhirnya tercapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia serta pelaksanaan Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

Kelima, dalam skripsi ini saya ingin menyampaikan bahwa bersatunya masyarakat dan TNI merupakan suatu kekuatan yang ampuh dalam menangkal segala gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Bangsa ini merupakan bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa pahlawan-pahlawannya. Masa peperangan telah berlalu, sekarang masa dimana generasi-generasi muda berperan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sebagai wujud cinta terhadap tanah air dan dalam rangka menghargai jasa para pahlawan yang telah mengawal negeri ini hingga tetap Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Wawancara dengan Abak B. Sabar yang lahir pada tanggal 21 Maret 1928, seorang Veteran Purn.Brimob Kompi Reserve II/5138 Gombel, Diwawancarai pada tanggal 15 juli 2017 di Magelang

Buku

A.H. Nasution. *Pokok-Pokok Geriliya dan Pertahanan Republik Indonesia DimasaJang laludan Jang Akan Datang*". Jakarta, 1953

_____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 2 – 10, Bandung: DISJARA-AD, 1977.

- _____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 4 (periode Linggarjati)*. Bandung: Angkasa. 1978
- _____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8*. Bandung: Angkasa. 1978
- _____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10. Agresi Militer Belanda II*. Bandung: Angkasa. 1979
- Gottschalk, Louis., *Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Hartono Kasmadi, dkk., *Monumen Perjuangan Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1986.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Penerbit Ombak, 2007.
- Hisbaron Muryantoro, *Aktifitas Tentara Pelajar dalam PHB Pada Masa Perang Kemerdekaan Tahun 1948-1949*. Yogyakarta: Patrawidya, 2007.
- I Gde Widja, *Sejarah Lokal Suatu Prospektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1989.
- “Kabupaten Magelang hasil Registrasi Penduduk Akhir 1993”, Magelang: Pemdemerintah Daerah dan Kantor Statistik Kabupaten Magelang 1992.
- Kahin. G.M.T., *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah TNI AD Kodam VII/Diponegoro Sirnaning Yakso Gapuraning Ratu*. Semarang. Yayasan Diponegoro, 1971.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Madjiono, *Sejarah Perjuangan Masyarakat Kota Magelang di Masa Perjuangan Phisik Tahun 1945-1950*. Magelang: Dewan Harian Cabang Angkatan 45, 2003.
- Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 jilid I*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Moekardi, *Magelang Berjuang*. Magelang: Akademi Militer, 1982.
- Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitiandan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1971.
- _____, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Indayu, 1978.
- Prijadji, *Perjuangan Komando Distrik Militer dalam Menghadapi Class II*, IKIP Press: tidak diterbitkan, 1997.

- Pusat Sejarah Angkatan Darat, *Peranan TNI Angkatan Darat Dalam Revolusi Kemerdekaan*. Bandung: Pussemad, 1965.
- Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Sejarah Jawa Tengah*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta: Depdikbud, 1978.
- Soekimin Adiwiratmoko, *Magelang Kota Harapan*. Magelang: Dinas Pariwisata. 1988
- T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran :Kisah Pengalaman Seorang Pradjurit Selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pembangunan, 1960.
- Tim Riset Kabupaten Magelang. *Naskah Perjuangan Rakyat Kabupaten Magelang*. Magelang: BAPEDA, 1974.
- Tim Riset Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. *Naskah Perjuangan Rakyat Kabupaten Magelang*. Magelang. BAPEDA, 1974.

Daftar Sumber Internet

- “Magelang: Scholen” dalam *Nieuwe courant*, 14 September 1949, diunduh dari situs <http://www.delpher.nl/nl/kranten> pada 9 Juli 2017
- “Trein ontspoord” dalam *De vrije pers*, 10 Juni 1949, diunduh dari situs <http://www.delpher.nl/nl/kranten> pada 9 Juli 2017.

Yogyakarta, 25 Agustus 2017

Mengetahui,
Penguji Utama,



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.

NIP. 19770618 200312 2 001

Disetujui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Aman, M.pd.

NIP. 19741015 200312 1 001